

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.36, 2008

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.  
Ekonomi-Teknik. Indonesia-Kolombia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI  
DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (*AGREEMENT ON ECONOMIC  
AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF COLOMBIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (*Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia*) dan telah ditandatangani pula Nota Diplomatik pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia;

- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (*AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (*Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris dan Nota Diplomatik yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**PERSETUJUAN  
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA**

---

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak" ;

Berhasrat untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara ;

Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dan kerjasama teknik berdasarkan atas prinsip-prinsip persamaan dan saling menguntungkan ;

Telah menyetujui sebagai berikut :

**PASAL I**

1. Para Pihak akan berusaha melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dari kedua Pihak, yang akan diperinci kemudian atas kesepakatan bersama.

## PASAL II

1. Kerjasama ekonomi dan teknik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang di masing-masing negara.
2. Para Pihak juga akan mendorong dan memberikan kemudahan terhadap berbagai aspek kerjasama ekonomi dan teknik antara badan-badan hukum dan antara lembaga-lembaga khusus kedua negara.

## PASAL III

Pelaksanaan kerjasama ekonomi dan teknik atas proyek-proyek sebagaimana disebutkan dalam Pasal II akan diatur dalam program tersendiri, pengaturan-pengaturan khusus dan/atau kontrak-kontrak yang disetujui dan disepakati oleh instansi berwenang dari Kedua Pihak. Pengaturan-pengaturan khusus tersebut akan menentukan persyaratan-persyaratan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kedua Pihak.

## PASAL IV

1. Kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini akan dilaksanakan bersama, dalam batas-batas kemampuan masing-masing Pihak, dan akan dilaksanakan atas dasar kebutuhan-kebutuhan tertentu melalui pengaturan-pengaturan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal III dari Persetujuan ini.
2. Setiap dukungan dana tambahan dari lembaga-lembaga internasional dan/atau negara lain, atas kesepakatan bersama, dapat dimanfaatkan oleh Kedua Pihak untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini.

**PASAL V**

Masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akan memberikan kepada warga negara dari Pihak lainnya, segala bantuan yang dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban mereka, sesuai peraturan-peraturan dalam Persetujuan ini.

**PASAL VI**

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama dalam rangka meningkatkan dan mengkoordinasikan Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
2. Komisi Bersama akan mengadakan pertemuan secara bergiliran di Kolombia dan Indonesia pada waktu yang disetujui bersama yang akan diberitahukan melalui saluran diplomatik. Komisi Bersama ini bila diperlukan akan membentuk kelompok kerja dan menunjuk ahli-ahli dan penasehat-penasehat untuk menghadiri pertemuan.

**PASAL VII**

1. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan tenaga-tenaga pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait kedua negara.
2. Para Pihak sepakat bahwa setiap hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan ;

- a. masing-masing Pihak akan diijinkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, pemakaian dan peningkatan hak kekayaan intelektual tersebut ;
  - b. dalam hal hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya berhak mendapatkan bagian royalti yang adil ;
3. Para Pihak akan saling menjamin bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak kedalam wilayah Pihak lainnya untuk melaksanakan setiap pengaturan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan, bukan merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak pihak ketiga yang sah.
  4. Para Pihak akan saling melepaskan hak dari setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga mengenai pemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk melaksanakan pengaturan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan.

#### PASAL VIII

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggung jawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yaitu warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia ) atau warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan diatas.

**PASAL IX**

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan.

**PASAL X**

1. Jika masing-masing Pihak berkeinginan untuk merubah peraturan dalam Persetujuan ini, dapat disampaikan setiap saat melalui saluran diplomatik atau konsultasi-konsultasi antara Kedua Pihak.
2. Konsultasi-konsultasi dimaksud akan dimulai dalam waktu 3 bulan dari tanggal permintaan, jika tidak Kedua Pihak sepakat untuk memperpanjang waktu tersebut.
3. Setiap perubahan atas Persetujuan ini akan diakui sesuai dengan prosedur perundang-undangan dari masing-masing Pihak dan akan berlaku melalui pertukaran nota diplomatik.

**PASAL XI**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir oleh kedua belah Pihak melalui saluran-saluran diplomatik bahwa persyaratan perundang-undangan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit enam bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.



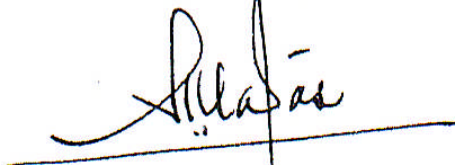
**PASAL XII**

Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi penyelesaian kontrak-kontrak terpisah atau persetujuan-persetujuan yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini dan yang belum sepenuhnya dilaksanakan pada saat berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DAN DITANDATANGANI di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1999 dalam rangkap dua masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA



ALI ALATAS  
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK KOLOMBIA



LUIS FERNANDO ANGEL  
Duta Besar  
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

**ACUERDO  
SOBRE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA  
ENTRE  
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA  
Y  
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

---

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Colombia, en lo sucesivo llamados "Las Partes";

Deseosos de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los dos países;

Pretendiendo desarrollar y promover una cooperación mutuamente provechosa en los campos económico y técnico con base en los principios de igualdad y beneficio mutuo;

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO I**

1. Las Partes tomarán las medidas necesarias para estimular y desarrollar la cooperación técnica y económica entre los dos países dentro del marco del presente Acuerdo según sus respectivas leyes y regulaciones.
2. La cooperación técnica y económica indicada en este Acuerdo cubrirá áreas de interés común para ambas partes, lo cual será precisado posteriormente mediante consentimiento mutuo.

**ARTICULO II**

1. La cooperación técnica y económica será efectuada de acuerdo con los requisitos y habilidades, así como con los términos y condiciones que se acuerden entre las empresas y organizaciones competentes de cada país.

2. Las Partes también estimularán y facilitarán los distintos aspectos de la cooperación técnica y económica entre sus entidades corporativas y entre sus instituciones especializadas.

### ARTICULO III

La implementación de la cooperación técnica y económica en los proyectos contemplados en el Artículo II será preparada en programa, acuerdos y/o contratos separados, a ser acordados y ejecutados por los estamentos competentes de las Partes. Tales Acuerdos específicos indicarán los términos y condiciones, derechos y obligaciones de las Partes.

### ARTICULO IV

1. Dentro del marco del presente Acuerdo la cooperación será realizada sobre una base conjunta, dentro de los límites de la capacidad de cada una de las Partes y se establecerá en cada caso individual a través de los acuerdos especiales mencionados en el Artículo III de este Acuerdo.
2. El apoyo económico adicional proveniente de organismos internacionales y/o de otros países podrá, previo mutuo consentimiento, ser utilizado por cualquiera de las Partes, a fin de financiar las actividades desarrolladas dentro del marco del presente Acuerdo.

### ARTICULO V

De conformidad con las leyes y reglamentaciones existentes, cada una de las Partes brindará a los nacionales del otro país toda la ayuda posible en cumplimiento de sus obligaciones, según las disposiciones del presente Acuerdo.

### ARTICULO VI

1. Las Partes acuerdan establecer una Comisión Conjunta para promover y coordinar la Cooperación Económica y Técnica.

2. La Comisión Conjunta se reunirá de manera alterna en Colombia e Indonesia según lo acordado mutuamente, lo cual será informado por vía diplomática. Esta Comisión Conjunta, cuando sea necesario, podrá crear grupos de trabajo y nombrar expertos y asesores para que asistan a las reuniones.

#### ARTICULO VII

1. Las Partes tomarán las medidas necesarias para estimular la cooperación técnica entre ellos mediante el intercambio de información tecnológica y científica y de expertos, técnicos e instructores, además del fomento de todos los aspectos de la cooperación técnica entre las instituciones especializadas de ambos países.
2. Las Partes convienen en que cualquier propiedad intelectual surgida de la ejecución del presente Acuerdo será poseída de manera conjunta y:
  - a) A cada una de las Partes le será permitido utilizar dicha propiedad intelectual con el propósito de mantener, adaptar y mejorar la propiedad pertinente;
  - b) En el caso de que la propiedad intelectual sea utilizada por una de las Partes y/o instituciones a nombre del Gobierno con fines comerciales, la otra Parte tendrá el derecho a obtener una parte equitativa de las regalías.
3. Las Partes indemnizarán la una a la otra por los Derechos de Propiedad Intelectual traídos por dicha Parte al territorio de la otra Parte para la ejecución de cualquier proyecto, acuerdo o actividad siempre que no sea el resultado de ninguna violación a los derechos legítimos de terceras partes.
4. Las Partes renunciarán entre sí a cualquier demanda presentada por una tercera parte en razón de la propiedad y legitimidad del uso de los Derechos de Propiedad Intelectual presentada por las Partes para la ejecución de cualquier proyecto, acuerdo o actividad.

#### ARTICULO VIII

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Colombia serán responsables del manejo de las demandas que pudieren entablar terceras partes en contra de los expertos, asesores, técnicos u otras personas que presten sus servicios.

oficiales que fueren indonesios (si están en Colombia) ó colombianos (si están en Indonesia) y los mantendrán libres de cualquier perjuicio con respecto a los reclamos ó responsabilidades surgidas de la negligencia grave ó conducta indebida premeditada de dichos individuos.

#### ARTICULO IX

Cualquier controversia entre las Partes surgida de la interpretación ó ejecución de este Acuerdo será dirimida amigablemente mediante negociación.

#### ARTICULO X

1. Si cualquiera de las Partes considera conveniente modificar cualquier disposición de este Acuerdo, ésta podrá solicitarlo en cualquier momento a través de la vía diplomática ó de consulta entre la Partes.
2. Dichas consultas se iniciarán dentro de un lapso de tres meses a partir de la fecha de la solicitud, a menos que las Partes convengan en una extensión de este periodo.
3. Toda enmienda al Acuerdo será aprobada de conformidad con los procedimientos constitucionales de cada una de las Partes y entrará en vigor mediante el canje de las notas diplomáticas.

#### ARTICULO XI

1. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha del recibo de la última notificación mediante la cual las Partes informarán la una a la otra por vía diplomática que sus respectivos requisitos constitucionales han sido cumplidos para ejecutar este Acuerdo.
2. Este Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo de tres años y será renovado automáticamente por periodos sucesivos de un año, a menos que cualquiera de las Partes mediante aviso previo por escrito con seis meses de anterioridad informe su intención de terminar este Acuerdo.

**ARTICULO XII**

A la expiración del presente Acuerdo, sus disposiciones y aquellas de cualquier contrato o acuerdo independiente, relacionado con el mismo, continuarán rigiendo con respecto a las obligaciones pendientes y sin expirar ó los proyectos asumidos ó iniciados en virtud del mismo, antes de la fecha de terminación, como si este Acuerdo no hubiese terminado o expirado.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo.

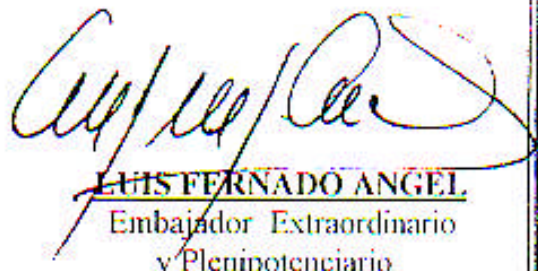
DADO Y FIRMADO en Jakarta, el 13 de Octubre de 1999 en dos originales en idiomas indonesio, español e inglés, todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia acerca de la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

Por el Gobierno de la  
República de Indonesia



ALI ALATAS  
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la  
República de Colombia



LUIS FERNANDO ANGEL  
Embajador Extraordinario  
y Plenipotenciario

**AGREEMENT  
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA**

---

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia, hereinafter referred to as "The Parties" ;

Desiring to strengthen the friendship and cooperation between the two countries ;

Intending to develop and to promote a mutually advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit ;

Have agreed as follows :

**ARTICLE I**

1. The Parties shall endeavour to take all the necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperations between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
2. The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas of common interest to both Parties, which will be further specified by mutual consent.

## ARTICLE II

1. The economic and technical cooperations shall be effected in accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and organizations in each country.
2. The Parties shall also encourage and facilitate the various aspects of economic and technical cooperations between their corporate bodies and between their specialized institutions.

## ARTICLE III

The implementation of economic and technical cooperations on projects envisaged in Article II shall be arranged under separate programme, arrangements and/or contracts to be agreed upon and concluded by the competent authorities of the Parties. Such specific arrangements shall specify the terms and conditions, rights and obligations of the Parties.

## ARTICLE IV.

1. Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out on a joint basis, within the limits of each Party's capability, and shall be established in each individual case through special arrangements as mentioned in Article III of this Agreement.
2. Additional financial support from international bodies and/or other countries may, upon mutual consent, be utilized by either Party to finance the activities carried out within the framework of this Agreement.



**ARTICLE V.**

Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the citizens of the other, pursuant to the provisions of this Agreement all possible assistance in the fulfillment of their duties.

**ARTICLE VI.**

1. The Parties agree to establish a Joint Commission to promote and coordinate the Economic and Technical Cooperations.
2. The Joint Commission shall meet alternately in Colombia and Indonesia on their mutually agreed upon which will be communicated through diplomatic channels. This Joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meeting.

**ARTICLE VII**

1. The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between specialized institutions of both countries.
2. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and;

- a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting, and improving the relevant property;
  - b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall entitle to obtain equitable portion of royalty.
3. The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property Rights brought by the Party into the territory of the other Party for the implementation of any project arrangement or activities is not resulted from any infringement of third party's legitimate rights.
  4. The Parties shall waive each other from any claim made by the third party on the ownership and legality of the use of the Intellectual Property Rights which is brought in by the Parties for the implementation of any project arrangement or activities.

#### ARTICLE VIII

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia shall be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against experts, advisors, technicians or other persons performing official services who are Indonesians (if they are in Colombia) or Colombians (if they are in Indonesia) and shall hold them harmless in respect of claims or liabilities arising from gross negligence or wilful misconduct of the said individuals.

## ARTICLE IX.

Any dispute between The Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by negotiation.

## ARTICLE X

1. If either of the Parties considers it desirable to amend any provision of this Agreement, it may request, at any time through diplomatic channels or consultations between The Parties.
2. Such consultations shall begin within a period of three months from the date of the request unless the Parties agree to an extension of this period.
3. Every amendment to the Agreement shall be approved in accordance with the constitutional procedures of either Party and shall enter into force through exchange of diplomatic notes.

## ARTICLE XI.

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that their respective constitutional requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of three years and shall be automatically renewed for successive periods of one year unless either Party gives six months prior notice in writing of its intention to terminate this Agreement.

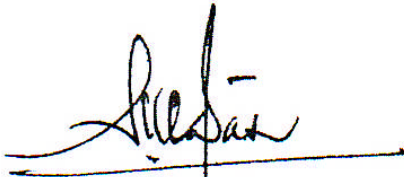
## ARTICLE XII.

Upon expiration of this Agreement, its provisions and those of any separate contract or agreement made in that respect shall continue to govern the outstanding and unexpired obligations or projects assumed or commenced thereunder, prior to the date of termination, as if this Agreement had not been terminated or expired.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AND SIGNED in Jakarta on October 13, 1999 in two original in Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the  
Republic of Indonesia



ALI ALATAS  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the  
Republic of Colombia



LUIS FERNANDO ANGEL  
Ambassador  
Extraordinary and Plenipotentiary

Terjemahan Tidak Resmi Bahasa  
Indonesia Nota Diplomatik Kemlu Kolombia

DCI No. 33585

Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerjasama Internasional menyampaikan salam hormatnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia dan merujuk pada Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara pemerintah RI dan Pemerintah Kolombia.

Dalam kaitan tersebut di atas dan merujuk pada Nota DCI No. 29214, Direktorat Kerjasama Internasional menginformasikan bahwa, mempertimbangkan Persetujuan tersebut, nampak jelas bahwa dalam kasus perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Inggris yang akan menjadi rujukan, kami tidak berkeberatan dengan adanya perubahan teks dalam pasal VIII terjemahan bahasa Indonesia, sehingga dalam hal ini, kami yakin bahwa pemerintah Indonesia akan dapat meneruskan prosedur internal demi penyempurnaan Persetujuan ini.

Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia ingin menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia penghargaan yang setinggi-tingginya.

Bogota D.C., 6 Juli 2007

Kedutaan Besar Republik Indonesia  
Bogota



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

DCI No. 33585

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Cooperación Internacional, saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República de Indonesia con ocasión de referirse al Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica entre la República de Colombia y la República de Indonesia.

Al respecto, y dando alcance a la nota DCI No. 29214 la Dirección de Cooperación Internacional informa que, considerando que el citado acuerdo dispone que la versión en inglés suscrita prevalecerá en caso de que se presenten diferencias de interpretación, no tiene objeción alguna con respecto al cambio del texto del artículo VIII en el idioma indonesio y confía en que, de esta manera, el Ilustrado Gobierno de Indonesia podrá avanzar en los trámites internos que permitan posteriormente el perfeccionamiento de este Acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se vale de esta oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de la República de Indonesia las seguridades de su más alta consideración

Bogotá, D. C., 6 de julio de 2007

A la Honorable  
**Embajada de la República de Indonesia**  
Ciudad.

Unofficial Translation

DCI No. 33585

The Ministry of Foreign Affairs, Directorate of International Cooperation presents its compliments to the Embassy of the Republic of Indonesia and referring to the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Republic of Colombia and the Republic of Indonesia

In reference to the above and taking into account the note DCI No. 29214, the Directorate of International Cooperation informs that, considering to the mentioned agreement, makes clear that in case of conflict on its interpretation, the English version will be given preference, we do not have any objection regarding to the text changing in the article VIII in the Indonesian language, so in this way, we are confident that the illustrated government of Indonesia will be able to advance in the internal procedures for the perfection of this agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration.

Bogota D.C., July 6, 2007

Embassy of the Republic of Indonesia  
Bogota

Terjemahan Tidak Resmi Bahasa  
Indonesia Nota Diplomatik KBRI Kolombia

No. 09/Ekon/VII/2006

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota menyampaikan salam hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia dan merujuk Nota Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia No. D.M./OAJ.CAT.32193 tertanggal 30 Agustus 2002 mengenai proses ratifikasi Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara pemerintah RI dan Pemerintah Kolombia, yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 13

Oktober 1999, dengan hormat menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu adanya meralat (rectification) terjemahan bahasa Indonesia dari Pasal VIII dari Persetujuan dimaksud untuk keperluan proses ratifikasi menurut Perundang-undangan Indonesia sehingga menjadi tertulis sebagai berikut:

**Pasal VIII (Teks Kolombia)**

*Pemerintah Republik Kolombia dan Pemerintah Republik Indonesia akan bertanggung jawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.*

***Pasal VIII (Teks Indonesia)***

*Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggung jawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) atau warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.*

Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat menyatakan bahwa apabila proposal tersebut diatas disetujui oleh Pemerintah Republik Kolombia, maka nota ini dan nota jawaban dari Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia yang menyetujui proposal ini akan menjadi Persetujuan antara kedua Pemerintah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tehnik antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kolombia, yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1999.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota ingin menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia penghargaan yang setinggi-tingginya.

Bogota,                      Juli 2006





*Embajada de la República de Indonesia  
Bogotá, D. C.*

Nro 09/EKON/VII/2006

La Embajada de la República de Indonesia en Bogotá saluda muy atentamente a la honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y hace referencia a la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia No. D.M./OAJ.CAT.32193 que corresponde a la fecha 30 de Agosto de 2002 respecto al proceso de ratificación del Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno de la República de Indonesia y el gobierno de la República de Colombia, el cual fue firmado en Jakarta el 13 de Octubre de 1999, y tiene el honor de informarle amablemente que el Gobierno de la República de Indonesia necesita rectificar la traducción Indonesia del artículo VIII del Acuerdo, el cual es requerido para el proceso de ratificación por parte de la legislación Indonesia, tal como se expresa a continuación:

Pasal VIII (Teks Kolombia)

Pemerintah Republik Kolombia dan Pemerintah Republik Indonesia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan ~~memperlakukan mereka dengan baik~~ tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.

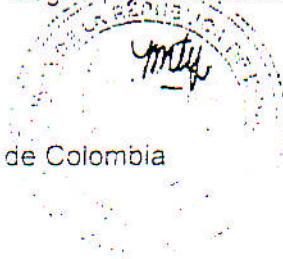
Pasal VIII (Teks Indonesia)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan ~~memperlakukan mereka dengan baik~~ tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.

La Embajada de la República de Indonesia tiene el honor de declarar que si la anterior propuesta es aceptable al Gobierno de la República de Colombia, esta nota y la nota de respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia indicando tal aceptación vendría a formar parte del Acuerdo entre los dos gobiernos y ser parte integrado del Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Colombia el cual fue firmado en el 13 de Octubre de 1999.

La Embajada de la República de Indonesia en Bogotá aprovecha esta oportunidad para reiterar al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Bogotá, 4 de Julio de 2006



Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia  
Bogotá

Unofficial Translation

No. 05/EKON/VI/2006.

The Embassy of the Republic of Indonesia in Bogota present its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia and referring to the Note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia No. D.M./OAJ.CAT.32193 dated on August 30, 2002 regarding ratification process of the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia which was signed in Jakarta on October 13, 1999, has the honor to kindly inform that the Government of the Republic of Indonesia need to rectify the Indonesian translation of the Article VIII of the Agreement which is required for the ratification process by the Indonesian Legislation to be rewritten as follows:

Pasal VIII (Teks Kolombia)

Pemerintah Republik Kolombia dan Pemerintah Republik Indonesia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan ~~akan memperlakukan mereka dengan baik~~ tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.

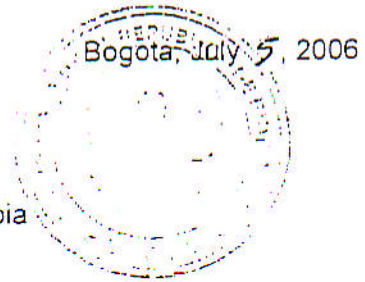
Pasal VIII (Teks Indonesia)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan ~~akan memperlakukan mereka dengan baik~~ tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas.

The Embassy of the Republic of Indonesia has the honor to declare that if the above mentioned proposal is acceptable to the Government of the Republic of Colombia, this note and the note reply from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic Colombia which indicating such acceptance will become the Agreement between both Governments and to be an integral part of the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government

Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia which was signed in Jakarta on October 13, 1999.

The Embassy of the Republic of Indonesia in Bogota avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia the assurances of its highest consideration.



Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia  
Bogota